

## UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA

Kasus Positif  
**95,418**  
+ 1,761Sembuh  
**53,945**  
+ 1,781Meninggal  
**4,665**  
+ 89Seluruh  
Positif 15  
Sembuh 9  
Meninggal

TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Swasta Diminta Legawa Bangun Jakarta • Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia

Senin 11 Mei 2020, 14:25 WIB

**Palu MK atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

Atang Irawan, Pengamat Hukum Tata Negara | Opini



MI/Panca Syurkani

Atang Irawan, Pengamat Hukum Tata Negara

PERSIDANGAN pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Mahkamah Konstitusi (MK) selalu dinanti para penggiat hukum, meskipun pengujian Perppu oleh MK bukanlah hal baru. MK telah menguji 8 Perppu dari 27 permohonan (dengan beberapa permohonan yang sama), dan telah melahirkan 12 putusan.

Memperhatikan putusan MK atas pengujian Perppu, belum satu pun permohonan yang dikabulkan MK, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Beberapa klasifikasi putusan MK, yakni, pertama menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Karena, pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menguji Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, MK menilai permohonan telah kehilangan objek permohonan. Sehingga, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena Perppu tersebut sudah diterima dalam rapat paripurna DPR dan disahkan sebagai UU selama berlangsung proses persidangan di MK.

**Berita Terkini****Hari Kedua, Operasi Patuh Jaya Kendaraan**

MEGAPOLITAN

Kendaraan bermotor paling banyak mendapatkan penilangan. Melawan arus menjadi salah satu alasan diberikan...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:39 WIB

**Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri**

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

**AS-Indonesia Tanda Tangan Ker Pembangunan**

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ini hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

**Satu Pasien Positif Covid-19 Kabu Wisma Atlet**

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

**Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring**

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

**Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortu Dunia**

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

**Warga Sorong Palang Jalan Akib Berulang**

NUSANTARA

92/PUU-XI/2013. Putusan MK serupa juga terjadi atas pengujian atas 6 permohonan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Ketiga, MK menilai permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan, permohonan terhadap pengujian pernah diajukan dalam perkara lain dan telah diputus oleh MK.

Hal itu antara lain pada Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, terhadap pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Karena MK mendasarkan pada Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Keempat, permohonan dinyatakan gugur, karena MK telah memanggil pemohon secara patut, namun pemohon tidak hadir dalam persidangan MK. Putusan itu seperti dalam perkara Nomor 128/PUU-XII/2014.

Berkaca dari berbagai putusan MK atas pengujian Perppu, maka MK dalam menguji Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK pada klasifikasi kedua di atas, karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan atau Stabilitas Sistem Keuangan, telah disetujui, dibahas dan disepakati DPR dalam rapat Banggar yang digelar Senin (4/5) malam.

Dapat dipastikan akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian pemohon telah kehilangan objek permohonan, karena Perppu yang sedang diuji oleh MK telah berubah menjadi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU.

Meskipun MK berwenang menguji Perppu atas tafsirnya, dan telah berulang kali melakukan pengujian terhadap Perppu. Namun, wewenang tersebut secara gramatikal tidak ditemukan dalam Pasal 24C UUD 1945, yang pada prinsipnya MK diberikan kewenangan secara limitatif. Salah satunya adalah menguji UU terhadap UUD.

#### Perbedaan pandangan

Dengan demikian, pengujian Perppu dalam diskursus akademik masih mengundang perbedaan pandangan. Beberapa hal yang menjadi perdebatan itu, pertama, MK menafsir wewenangnya dalam rangka menguji Perppu akan beririsan dengan kewenangan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, bahwa Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.

Bagaimana jika MK menyatakan Perppu bertentangan dengan UUD 1945, apakah sekaligus menghilangkan wewenang DPR sebagaimana dimaksud? Bagaimana jika yang dibatalkan hanya pasal atau beberapa pasal, padahal DPR diberikan wewenang memberikan persetujuan terhadap Perppu secara komprehensif, dan merupakan kewenangan DPR secara orisinil yang tidak dapat didelegasikan atau dibagi-bagi?

Kedua, makna MK menguji UU terhadap UUD adalah menguji secara vertikal. Namun dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, MK mendasarkan pada pengujian horizontal. Disebutkan bahwa MK berwenang menguji Perppu dengan alasan kedudukan yang sama antara UU dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketiga, bagaimana jika DPR tetap mendasarkan pada pandangannya, bahwa DPR yang secara tegas diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu oleh UUD (constitutionally entrusted power), maka akan berakibat terjadinya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Sesuai Pasal 24C UUD 1945 MK diberi wewenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Tentunya, MK tidak dapat menjadi pemohon atas dirinya dalam SKLN.

Keempat, apakah Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD baik secara keseluruhan atau hanya sebatas pasal-pasal, dapat dikatakan bertentangan dengan hukum, padahal UUD merupakan sumber hukum? Jika dianggap bertentangan dengan hukum, apakah dapat disamakan dengan syarat pemakzulan terhadap Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.

Kelima, secara gramatikal, UUD 1945 tidak mengenal istilah Perppu. Namun, dalam Pasal 22 UUD 1945 dikenal istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti UU. Dengan demikian kedudukannya adalah Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU. Jika dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, maka Peraturan Pemerintah (PP) seharusnya merupakan pendelegasian dari UU. Namun dalam Pasal 22 UUD 1945 menyatakan PP sebagai pengganti UU.

Keenam, Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Maka makna persetujuan

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

### Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai dari angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Selengkapnya

### Top Tags

- # Babel
- # Jokowi
- # Anies Baswedan
- # an
- # PSBB

### BenihBaik.com

#### Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

#### Kimia Farma Sumbang Rp1 Milia

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

#### Media Group Kembali Salurkan Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Ji Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

#### AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS R19 via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bisa yang diikuti oleh seluruh perusahaan...

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

#### Benih Baik Hadapi Gelap dengan

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

Selengkapnya

### Berita Populer

#### Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yodi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

#### Pelaku Pembunuhan Yodi Prabono

MEGAPOLITAN



#### RUBRIKASI

##### OPINI

[Editorial](#)  
[Podium](#)  
[Kolom Pakar](#)

##### EKONOMI

[Politik dan](#)  
[Hukum](#)

##### HUMANIORA

[Nusantara](#)

##### OLAHRAGA

[Sepak Bola](#)  
[Otomotif](#)

##### WEEKEND

[Megapolitan](#)

##### VIDEO

[Foto](#)  
[Infografis](#)

[Berita](#)  
[Marcom](#)  
[Publishing](#)  
[Rss](#)

[Tentang](#)  
[Beriklan](#)  
[Contact](#)  
[Karir](#)  
[Pedoman Media Siber](#)

##### IKUTI KAMI DI

[Youtube](#)  
[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[Contact Info](#)

##### INFORMASI

[Phone: 021 582 1303](#)  
[Fax: 021 582 0476](#)  
[Email: \[cs@mediaindonesia.com\]\(mailto:cs@mediaindonesia.com\)](#)  
[marketing.onlinedigital@mi.](#)

Dari beberapa potensi masalah konstitusional tersebut di atas, maka sebaiknya Badan Kajian MPR melakukan kajian terkait kedudukan Perppu, dan kewenangan MK dalam menguji Perppu.

Apakah perlu secara tegas diatur bahwa MK berwenang menguji UU/peraturan perundang-undangan sederajat terhadap UUD? Apakah tepat istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti UU? Sementara pasal 5 ayat (2) UUD 1945 meletakkan PP dalam rangka menjalankan UU.



TAGS: # Opini

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

## Baca Juga

### Naik Kelas di Tengah Wabah

 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta  Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB


Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

### Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care  Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

### Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

  Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

### Polisi Sebut Dua Pria yang Berjal Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

### CCTV Menunjukkan Waktu Yodi l

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

### Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi deng Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

### Polisi Temukan Ceceran Darah d Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

### Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lapo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

## Berita Weekend

### Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

### Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

### Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

### Tips Sehat Berbelanja di Masa Pe

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarke atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya